

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan Kebijakan Represif¹ oleh pemerintahan Hindia-Belanda, melalui pembatasan terhadap kebebasan berserikat, pembungkaman pers, dan penindasan terhadap tokoh-tokoh pergerakan, menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya kesadaran nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Namun, kesadaran nasionalisme tidak semata-mata lahir dari tekanan dan penindasan tersebut. Melainkan kesadaran nasionalisme tumbuh melalui proses panjang yang melibatkan perkembangan pendidikan, terbukanya akses terhadap pemikiran modern dan interaksi antar pemuda dari berbagai daerah yang menempuh pendidikan seperti yang ada di wilayah Batavia. Nasionalisme menjadi sebuah respon bersama terhadap ketidakadilan pemerintah Hindia-Belanda.

Setelah diberlakukannya kebijakan represif pada tahun 1926, dibentuk sebuah partai yang gagasan utamanya bersifat nasionalisme yaitu Partai Nasional

¹ Penerapan kebijakan represif sebagai bentuk kebijakan yang diterapkan dalam membatasi aktivitas ruang gerak masyarakat Indonesia melalui organisasi-organisasi. pemerintah Hindia-Belanda menerapkan berbagai kebijakan baru yang seperti penghapusan kebebasan berkumpul (mengadakan rapat/*vergadering*), dan pengurangan atau penghapusan kesejahteraan bagi para pekerja. Kebijakan Represi di terapkan di tahun 1926 dengan puncaknya pada saat Gubernur Jenderal Dirk Fock tiba di Hindia Belanda kemudian mengambil sikap dengan melakukan tindakan satuan khusus sebagai bentuk untuk mengamankan serta menindas Bumiputera yang dianggap membahayakan terhadap pemerintahan Belanda. lihat Nasihin. *Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1945* ta: Pustaka Pelajar. 2012). 113-115.



Indonesia (PNI) di bawah pimpinan Soekarno dengan arah tujuan mengedepankan prinsip perjuangan politik melalui bentuk perlawanan terhadap kolonialisme.²

Munculnya kesadaran nasionalisme mendorong para tokoh pemuda untuk terlibat dalam berbagai aktivitas pergerakan nasional. Dalam hal ini, pergerakan nasional di Indonesia dipelopori oleh kaum pemuda sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan Hindia-Belanda. Salah satu bentuk gerakan yang dilakukan oleh kaum pemuda adalah menjadikan pendapat dan ide sebagai kekuatan utama dalam memperjuangkan akan hak menuju Indonesia merdeka. Pergerakan nasional ditandai dengan terbentuknya berbagai organisasi pemuda berbasis kedaerahan yang berperan penting dalam menyampaikan gagasan dan ide melalui wadah organisasi. Kemunculan berbagai organisasi kedaerahan sebagai dasar upaya dalam melawan pemerintahan Hindia-Belanda, melalui semangat persatuan, identitas kolektif dan kesadaran akan pentingnya kemerdekaan.³ Salah satu hal yang paling penting dalam masa tersebut adalah kesadaran nasional yang telah tumbuh baik itu di pulau Jawa maupun luar pulau Jawa, termasuk di wilayah Sulawesi yang memainkan peran penting dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda.

Salah satu perkumpulan yang menjadi wadah berhimpunnya berbagai organisasi dan partai dari berbagai wilayah Hindia-Belanda yang menganut paham nasionalis adalah Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan (PPPKI). PPPKI

² Shiraishi Takashi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1945* (Yogyakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1997). 44-46.

Sartono Kartodirdjo. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah dan Nasional* (Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2015). 183-184.



(Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) merupakan suatu barisan kaum kulit berwarna yang bersatu dengan membentuk suatu kekuatan bersama sehingga melahirkan pergerakan sebagai bentuk konfrontasi terhadap pemerintahan Hindia Belanda. P.P.P.K.I merupakan suatu front bersatu dari berbagai organisasi-organisasi ataupun perkumpulan yang ada di Indonesia yang bergerak di bidang politik dengan pembentukannya pada tahun 1927.⁴

Kongres PPPKI pertama kali diadakan di Surabaya pada tahun 1931. Kongres ini menjadi kongres berkumpulnya seluruh organisasi serta utusan partai politik Indonesia yang berasaskan kebangsaan.⁵ Adapun organisasi-organisasi yang mengikuti kongres tersebut adalah Partai Nasional Indonesia, Partai Sarekat Islam, Budi Oetomo, serta beberapa utusan dari setiap perkumpulan atau dikenal sebagai organisasi kedaerahan. Selain itu, pelaksanaan kongres ini turut dihadiri oleh organisasi kedaerahan yang ada di wilayah Indonesia seperti Perserikatan Selebes, Timorsch Verbond, Sarekat Ambon, Pasundan, Madura Bond Serta Perserikatan Minahasa.⁶

Perserikatan Selebes merupakan salah satu organisasi kedaerahan yang didirikan di Batavia pada Maret 1930. Pembentukan organisasi ini diawali ,dari

⁴ Ricklefs. M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: Serambi. 2005). 480.

⁵ Dellamenais. “Menyambut Kongres PPPKI”, dalam buku Ir Soekarno. *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I* (Yogyakarta: Yayasan Bung Karno. 2015). 89-90.

De Amstelbode, 24 Desember 1931. “Congres Van Indonesia Raya.” No.



perkumpulan para pemuda asal Sulawesi yang sedang menempuh pendidikan di Pulau Jawa. Awalnya organisasi ini bersifat kedaerahan, namun organisasi ini kemudian mengalami perkembangan dengan menjadi organisasi politik yang aktif bergerak dalam ranah nasionalisme. Dalam pembentukan Perserikatan Selebes, adapun tokoh yang berperan penting di dalamnya adalah Th. N. Lengkong merupakan pengurus utama yang mempelopori dibentuknya Perserikatan Selebes. Selain Lengkong, adapun tokoh-tokoh yang bergabung dalam Perserikatan Selebes di antaranya adalah O.H. Pantaow, J.A. Waney, A. Tomponu, Najamuddin Daeng Malewa, Lindoe Marsajit, Nyonya Lumenta, Salawati Daud.⁷

Dalam tubuh organisasi Perserikatan Selebes mengalami perpecahan yang diawali pada tahun 1931. Hal ini dapat dilihat melalui konflik yang timbul diakibatkan dari peristiwa pemindahan Departemen pusat oleh Pedoman Besar Lengkong tanpa adanya perundingan di kalangan anggota cabang yang tersebar di pemerintahan Hindia-Belanda selain dari konflik. Selain itu, terdapat pula konflik yang disebabkan oleh salah satu pengurus pusat yaitu Pantouw dengan melakukan tindakan propaganda secara pribadi pada tahun 1930. Dari beberapa konflik tersebut menyebabkan salah satu cabang Perserikatan Selebes mengalami pembubaran yaitu cabang Makassar. Hal ini dapat dilihat melalui keputusan



Overzicht Van De Inlandsche En Maleisisch-Chineesche Pers, 05 Februari
emberita Makassar.” No. 36.

Perserikatan Selebes resmi keluar pada tanggal 23 Agustus 1931 dengan membentuk perkumpulan baru bernama Partai Selebes.⁸

Perserikatan Selebes merupakan organisasi yang tergabung dalam front PPPKI pada Mei 1930, Perserikatan Selebes resmi bergabung dengan diumumkannya pada kongres PPPKI I di Solo. Sementara itu, Partai Selebes bergabung dengan PPPKI melalui pengajuan permohonan keanggotaan sebagai upaya untuk turut serta dalam kongres nasional, sehingga pada Oktober 1931 Partai Selebes resmi menjadi anggota PPPKI.⁹ Dalam pelaksanaan kongres nasional PPPKI, menjadikan para peserta penuh kongres diberikan hak suara penuh dalam pelaksanaan rapat tertutup yang diselenggarakan. Hak suara penuh tersebut diwujudkan melalui penandatanganan manifesto sebagai hasil keputusan kongres. Selain itu, PPPKI turut menetapkan manifesto sebagai bentuk perjuangan untuk kemerdekaan dan kebebasan dalam berpendapat yang disatukan dalam satu gerakan bersama. Manifesto ini ditandatangani oleh seluruh perwakilan anggota konferensi yang hadir, termasuk Perserikatan Selebes dan Partai Selebes.¹⁰

Pada konferensi PPPKI yang dilaksanakan Maret 1932 yang dihadiri oleh beberapa anggota Perserikatan Selebes dan Partai Selebes menjadikan Joh Waney mengumumkan di hadapan para peserta kongres terhadap rencana penggabungan

⁸ “Agustus 1931” dalam Harry A. Poeze. *Politiek-Politioneele Overzichten van nederlandsch-Indie Deel III 1931-1934*. Netherlands: Foris Publications Holland. 1988. 100.



⁹ “September 1931” dalam Poeze. *Politiek-Politioneele Deel III*. 106.

¹⁰ *De Amstelbode*, 24 Desember 1931. “Congres Van Indonesia Raya.” No.

antara Perserikatan Selebes dan Partai Selebes. Penggabungan ini dilakukan dengan tujuan untuk mempersatukan perjuangan di kalangan penduduk sulawesi dalam menghadapi pemerintahan Hindia-Belanda dengan memperjuangkan nasib bangsa Indonesia yang masih berada di bawah kolonialisme.¹¹

Pada juni 1933 diadakan suatu pembicaraan di Surabaya terkait rancangan penggabungan Partai Selebes dan Perserikatan Selebes, namun hal tersebut masih menjadi bahan pertimbangan para pengurus yang hadir pada saat itu. Setelah perundingan tersebut, maka diputuskannya penggabungan Perserikatan Selebes dan Partai Selebes menjadi satu perkumpulan pada 1 Agustus 1933 sebagai Partai Sarekat Selebes (PARSAS) dengan pusat organisasi berada di Makassar.¹²

Latar belakang yang dipaparkan di atas menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Dari Perserikatan Selebes ke Partai Sarekat Selebes 1930-1935”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas mengenai Perserikatan Selebes maka dapat diperoleh beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian. Adapun rumusan masalah yang diambil oleh penulis adalah:

1. Mengapa di tengah terbentuknya PPPKI yang berasaskan kebangsaan, terbentuk organisasi Perserikatan Selebes?



¹¹“Maret 1932” dalam Poeze. *Politiek-Politieoneele III*. 154.

¹²*Deli Courant*, 07 Agustus 1933. “Partai Sarekat Selebes.” No. 178.

2. Mengapa organisasi Perserikatan Selebes mengalami perpecahan
3. Mengapa organisasi Perserikatan Selebes dan Partai Selebes mengalami penyatuan dengan membentuk Partai Sarekat Selebes di tahun 1933?

1.3 Batasan Masalah

Pada penulisan sejarah terdapat batasan-batasan masalah yang menjadi bagian dari suatu penelitian. Hal ini bertujuan agar pembahasan dalam penelitian menemukan inti yang menjadi permasalahan yang akan dibahas. Adapun batasan masalah mencakup batasan spasial dan batasan temporal yang menjadi dasar penulisan dalam penelitian yang dilakukan.

Pada penelitian ini, penulis mengemukakan batas spasial mencakup wilayah Sulawesi itu sendiri. Seperti dalam penjelasan di latar belakang mengemukakan bahwa perserikatan ini merupakan perkumpulan yang diperuntukan sebagai organisasi kedaerahan bagi masyarakat Sulawesi itu sendiri. Dimana dalam hal ini tujuan dibentuknya Perserikatan Selebes sebagai bentuk kesatuan pemuda sulawesi dalam melahirkan pergerakan nasional.

Pada batasan temporal mengambil jangka waktu pada tahun 1930 yang merupakan tahun didirikannya Perserikatan Selebes sebagai organisasi kedaerahan sulawesi yang bertujuan untuk mempertahankan diri dari dominasi Hindia-Belanda serta mendukung nasionalisme Indonesia dalam memperoleh Indonesia merdeka. Sementara, 1935 menjadi periode terakhir karena dalam periode tersebut berkaitan dengan masa keberjalanan Partai Sarekat Selebes serta menjadi tahun berintegrasi

rekat Selebes dengan menjadi satu kesatuan dalam partai Indonesia Raja.



1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pembentukan Perserikatan Selebes
2. Untuk mengetahui perpecahan Perserikatan Selebes.
3. Untuk mengetahui Mengapa di tahun 1933 organisasi Perserikatan Selebes mengalami perubahan dengan menjadi Partai Sarekat Selebes

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memperkaya literatur dari penulisan sejarah mengenai Perserikatan Selebes sehingga dapat menambah pengetahuan.
2. Menambah literatur terkait organisasi kedaerahan yang bergerak dalam Nasionalis

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Penelitian yang Relevan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sejumlah literatur sebagai bahan rujukan mengenai Perserikatan Selebes yang menjadi dasar sekaligus bahan pendukung untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tema penelitian.

Adapun literatur tersebut sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh St. Junaeda yang dituang dalam artikel jurnal yang berjudul, “*PPRS dan gagasan kebangsaan di Sulawesi Selatan awal 1930*”, pada tulisan ini memiliki konteks yang sama dengan penelitian yang



akan diteliti oleh penulis dengan garis besarnya membahas terkait Perserikatan Selebes, namun yang membedakan penelitian sebelumnya fokus konteksnya pada lembaga pendidikan yang didirikan oleh Perserikatan Selebes sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan dan pemerataan pendidikan di kalangan masyarakat Sulawesi. Sementara itu, pada penelitian ini berfokus pada tujuan pembentukan Perserikatan Selebes. Dari kedua hal ini maka penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan acuan untuk memperoleh informasi terkait dinamika organisasi Perserikatan Selebes dalam ranah sosial serta peran tokoh-tokoh yang berkontribusi melalui lembaga pendidikan yang didirikan oleh organisasi Perserikatan Selebes.

Buku yang ditulis oleh Harry A. Poeze dengan judul *“Politiek-Politieoneele Overzichten van Nederlandsch-Indie Deel III 1931-1934”*, dalam buku tersebut membahas terkait laporan perkembangan gerakan politik di tengah pemerintahan Hindia-Belanda. Pada buku tersebut menjelaskan secara detail laporan aktivitas keberjalanan organisasi kedaerahan dalam ranah politik, salah satunya adalah Perserikatan Selebes dengan menjelaskan terkait pembentukan dan tujuan dibentuknya organisasi Perserikatan Selebes, Partai Selebes, Partai Sarekat Selebes serta aktivitas-aktivitas ketiga perkumpulan tersebut. Dalam konteks tersebut maka penulis menggunakan kajian ini sebagai bahan penelitian untuk memperoleh informasi terkait aktivitas perserikatan selebes di tengah pemerintahan Hindia-Belanda di tahun 1931-1933.



uku yang ditulis oleh Sarkawi B. Husain dengan judul *“Sejarah Sekolah ”* dengan melihat didalamnya terkait perkembangan pergerakan nasional

melalui organisasi-organisasi lokal yang dibentuk di Makassar. pada penelitian ini tidak menjelaskan secara spesifik terkait Perserikatan Selebes namun penulis mengambil penelitian ini sebagai kajian sebagai bahan referensi dalam memahami organisasi-organisasi lokal yang ada di Sulawesi. Melalui penelitian ini maka informasi yang diperoleh mengenai tujuan pembentukan organisasi lokal di Sulawesi serta peran penting organisasi dalam mewujudkan kepentingan masyarakat Sulawesi di tengah pemerintahan Hindia-Belanda.

Buku yang ditulis M.C. Ricklefs dengan judul "*Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*", dalam buku tersebut penulis menjadikan sebagai kajian penelitian untuk memperoleh informasi berkaitan dengan Indonesia pada awal abad 20 sebagai bentuk dalam menuju kebangkitan nasional melalui aktivitas pergerakan nasional. Dalam hal ini penulis mengambil informasi terkait peran organisasi-organisasi kedaerahan yang dibentuk melalui kalangan elite terpelajar pada masa Hindia-Belanda serta menjelaskan terkait pembentukan organisasi-organisasi tersebut sebagai suatu yang mencerminkan kuatnya identitas-identitas kedaerahan, kesukuan dan kemasyarakatan dengan melihat pada organisasi Perserikatan Selebes.

Buku yang ditulis Shiraishi Takashi dengan judul "*Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*", dalam buku tersebut membahas terkait konsep ideologi yang diterapkan pada masa pemerintahan hindia Belanda dalam hal ini terdapat ideologi islamisme, komunisme, liberalisme dan nasionalisme

lidalamnya terdiri dari organisasi-organisasi yang menjadi awal mula tan nasional. Ideologi yang diterapkan sebagai bentuk Gerakan politik



menuju konsep nasionalisme. Penulis menggunakan kajian ini sebagai bentuk memperoleh informasi terkait konsep nasionalisme dengan melihat fenomena pada Perserikatan Selebes yang terbentuk sebagai organisasi yang bergerak dalam ranah nasionalisme.

1.6.2 Landasan Konseptual

1. Konsep Perserikatan

Secara etimologis, istilah perserikatan berasal dari kata “serikat” yang berarti ikatan, perkumpulan, atau gabungan yang terbentuk karena adanya tujuan bersama. dengan demikian, perserikatan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk organisasi atau asosiasi yang menghubungkan sekelompok individu dalam kerangka kerjasama kolektif. Mifdal Zusron A yang dituang dalam artikel jurnal ilmiah yang berjudul “Melihat Sejarah Nasionalisme Indonesia Untuk Memupuk Sikap Kebangsaan Generasi Muda.” menyebutkan bahwa Perserikatan adalah suatu istilah yang merujuk pada bentuk organisasi atau perkumpulan yang dibentuk oleh sekelompok orang yang dipersatukan dalam suatu kerjasama demi mencapai kepentingan bersama.¹³ Sementara itu, menurut Buku yang ditulis oleh Machmoed Effendhie dengan judul “Pengantar Organisasi” menyebutkan bahwa perserikatan merupakan suatu bentuk perkumpulan atau organisasi modern yang lahir dari kesadaran kolektif masyarakat untuk menghimpun diri dalam memperjuangkan kepentingan



Mifdal Zusron A. “Melihat Sejarah Nasionalisme Indonesia Untuk k Sikap Kebangsaan Generasi Muda.” *Jurnal Civics:Media Kajian negaraan*. Vol.13. No. 2 (2016). 210.

bersama. Dalam hal ini perserikatan berfungsi tidak hanya sebagai wadah kebersamaan, tetapi juga sebagai sarana dalam membangun solidaritas sosial, ekonomi maupun politik. Perserikatan menjadi penting hal ini menjadi alat dalam menyatukan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan latar belakang dalam tujuan bersama.¹⁴ Dalam konteks sosial dan politik, perserikatan melibatkan berbagai kelompok yang memiliki perbedaan namun dapat disatukan melalui kesepakatan bersama. Dalam hal ini dengan melihat sejarah Indonesia dan mengaitkan konsep perserikatan berupa menunjukkan adanya suatu gerakan dalam mencapai tujuan bersama melalui identitas bangsa. Adanya perserikatan memiliki peran penting dalam membangun rasa persatuan dan kesatuan dengan menjadi faktor utama dalam membangun identitas nasional serta memperjuangkan kepentingan bersama baik di kalangan masyarakat maupun kelompok tertentu.¹⁵ Dengan demikian perserikatan dapat dipahami sebagai suatu bentuk organisasi atau perkumpulan yang lahir dari kebutuhan masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan bersama, memperkuat identitas kelompok, serta bertransformasi menjadi sarana pembentukan kesadaran nasional. Perannya tidak hanya terbatas pada lingkup lokal, melainkan menjadi bagian dari perkembangan pergerakan nasional Indonesia.



Effendhie Machmoed. *Pengantar Organisasi*. (Jakarta: Universitas 2015). 05

Zusron . “Melihat Sejarah Nasionalisme”. 210.

2. Konsep Nasionalisme

Kahin, George M.T dalam bukunya yang berjudul “Nasionalisme dan revolusi di Indonesia” menyebutkan bahwa Nasionalisme merujuk pada suatu paham kebangsaan yang mencerminkan kesadaran dan semangat cinta terhadap tanah air. Dalam Nasionalisme merupakan suatu ideologi dalam suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi. Nasionalisme sendiri terdiri dari suatu gagasan mengenai kesatuan kebangsaan dalam suatu wilayah politik kenegaraan. Berbicara mengenai nasionalisme penerapannya ditandai dengan kejayaan yang telah diperoleh. Pada dasarnya nasionalisme lahir sebagai bentuk mewujudkan identitas bangsa itu sendiri akibat dari adanya suatu reaksi terhadap penjajahan yang dilakukan oleh bangsa kolonial. Di Indonesia konsep nasionalisme didasarkan pada politik identitas suatu bangsa yang digunakan sebagai alat perjuangan dalam reaksi akibat penjajahan yang dilakukan pemerintahan Hindia-Belanda. Soekarno menjadi salah satu tokoh yang memperkenalkan nasionalisme dikalangan masyarakat Hindia-Belanda melalui pembentukan partai yang bergerak di bidang nasional. PNI merupakan salah satu partai yang digunakan sebagai alat penggerak nasionalisme untuk memperlihatkan Identitas bangsa Indonesia.¹⁶ Sementara itu, Sarkawi B Husain dalam bukunya yang berjudul “Sejarah Sekolah Makassar” menyebutkan bahwa Nasionalisme adalah sebuah doktrin politik, perasaan, pikiran yang didasarkan atas asumsi bahwa masyarakat sebaiknya



Kahin, George M.T. *Nasionalisme dan revolusi di Indonesia*. (Cornel y. 1952). 56.

diorganisasikan dalam bentuk negara-negara (*nation-state*) dan negara bangsa akan menjadi titik sentral dari loyalitas individu dan kelompok.¹⁷ Dengan demikian dapat dipahami bahwa nasionalisme sebagai suatu paham kebangsaan yang mendorong persatuan, menumbuhkan kesadaran politik serta menjadi ideologi perjuangan melawan kolonialisme sekaligus sebagai pondasi bagi pembentukan negara bangsa Indonesia. nasionalisme bukan hanya semangat persatuan, melainkan menjadi kekuatan relevan dalam menjaga keutuhan bangsa suatu negara.

3. Konsep Pergerakan

Shiraishi Takashi dalam bukunya yang berjudul “Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926” menyebutkan bahwa pergerakan merujuk pada gerakan atau aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi dalam mencapai suatu perubahan serta mengatasi permasalahan demi kepentingan bersama. Dalam hal ini pergerakan ini berkaitan dengan kebangkitan jiwa nasionalisme dalam suatu bangsa. Pergerakan merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai bentuk perkumpulan, seperti rapat umum, pemogokan, partai politik, dan demonstrasi, yang menjadi dasar awal lahirnya gerakan nasional. Di Indonesia, konsep pergerakan berfungsi sebagai sarana ekspresi politik yang didasarkan pada berbagai ideologi yang berkembang pada masanya. Pergerakan nasional juga menjadi landasan teoritis



¹⁷ Husain Sarkawi B. *Sejarah Sekolah Makassar: Di Tengah Kolonialisme, ihan Pers, dan Pembentukan Elite Baru Periode 1976-1942*. (Makassar: Innawa, 2015). 89.

dalam pembentukan partai politik sebagai alat perjuangan. Kebangkitan nasional Indonesia ditandai dengan berdirinya Budi Oetomo pada tahun 1908, yang berperan sebagai organisasi kepemudaan pertama dan menjadi pelopor dalam mengawali gerakan nasionalisme di Indonesia.¹⁸ Sementara itu, Widyanta dalam bukunya yang berjudul “Problem Modernitas Dalam Kerangka menyebutkan bahwa pergerakan merupakan suatu aktivitas atau tindakan terencana yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat disertai dengan program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga masyarakat yang ada. Disamping itu dalam suatu gerakan ditandai dengan tindakan kelompok baik itu dalam bentuk organisasi, berjumlah besar serta individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu sosial, budaya, atau politik dengan arah tujuan suatu perubahan. ¹⁹Dengan demikian dapat dipahami bahwa pergerakan suatu aktivitas kolektif yang dilakukan oleh sekelompok atau organisasi dengan tujuan membawa perubahan serta mengatasi persoalan demi mencapai kepentingan bersama.

1.7 Metode Penelitian

Pada penelitian ini, diperlukan sebuah metode yang dapat mengumpulkan fakta-fakta dan prinsip-prinsip untuk menemukan kebenaran dari permasalahan



Takashi Shiraishi. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1945*. (Yogyakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1997). 44-46.

Widyanta AB. *Problem Modernitas Dalam Kerangka*. (Yogyakarta: Pustaka Rakyat Cerdas. 2002). 12

yang ada. Penelitian ini berbasis pada penelitian sejarah (historis). Untuk mencapai hasil yang didasarkan pada penelitian sejarah, langkah-langkah yang diambil mencakup sebagai berikut:

1. Pencarian Sumber. Pada tahap ini, pengumpulan sumber dilakukan dengan mengumpulkan data-data baik itu mencakup data secara tertulis maupun secara lisan yang relevan dengan topik penelitian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan sumber primer dengan melakukan penelitian lapangan secara langsung dengan melakukan pelacakan dokumen baik itu dari lembaga-lembaga arsip, pemerintahan maupun non pemerintahan. Selain sumber primer, peneliti juga menggunakan sumber sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Sumber sekunder dapat diperoleh dari buku-buku di perpustakaan dan referensi internet seperti jurnal. Sumber sekunder digunakan sebagai penunjang dan pelengkap penelitian ini.
2. Kritik Sumber. Dalam tahap kritik sumber peneliti mengolah data atau sumber yang telah diperoleh untuk menentukan apakah sumber tersebut layak digunakan dalam penelitian. Tahap ini melibatkan dua jenis kritik yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Kedua jenis kritik ini digunakan untuk memverifikasi keaslian dan keabsahan sumber-sumber yang diperoleh, baik berupa dokumen maupun hasil wawancara.
3. Interpretasi. Pada langkah ini, peneliti berupaya untuk menguraikan dan menghubungkan data-data yang telah diperoleh, kemudian memberikan tafsiran untuk merekonstruksi peristiwa sejarah agar dapat dipahami.



Dengan demikian, peneliti dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap penulisan sejarah yang didasarkan pada penafsiran peneliti.

4. Penulisan sejarah merupakan cara untuk menulis, memaparkan, atau melaporkan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Pada tahap akhir ini, peneliti menyajikan hasil penelitian sebaik mungkin sebagai sebuah penelitian sejarah dengan melakukan penulisan penelitian berdasarkan proses kronologis sehingga peristiwa sejarah tidak menjadi kabur. Oleh karena itu, penulisan sejarah harus dilakukan secara berurutan dari awal hingga akhir.

Penulisan atau penyajian

1.8 Sistematika Penulisan

pada tahap ini merupakan hasil dari penafsiran peneliti. berdasarkan sumber-sumber yang diperoleh dan menjadi tahap akhir atau dapat dikatakan proses penyusunan semua sumber yang telah diperoleh. Untuk memberikan gambaran singkat atau penjelasan lebih lanjut terkait penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menyajikan garis besar yang terdiri dari lima bab. Setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang disusun sesuai dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang gambaran umum mengenai judul dan tema dari penelitian yang dalam hal ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tentang gambaran umum mengenai kesadaran nasionalisme serta pergerakan nasional di tengah pemerintahan Hindia-Belanda. Dengan



didalamnya terdapat dua sub bab yaitu menuju nasionalisme dan konsep nasion dan nasionalisme.

Bab III, berisi tentang gambaran mengenai transformasi proses pembentukan Perserikatan Selebes, dengan didalamnya terdapat tiga sub bab yaitu pembentukan Perserikatan Selebes, hubungan dengan P.P.P.K.I serta pembentukan cabang-cabang Perserikatan Selebes.

Bab IV, berisi tentang gambaran mengenai transformasi Perserikatan Selebes menjadi Partai Sarekat Selebes. Dengan terdapat empat poin sub bab di dalamnya yang terdiri dari pembahasan mengenai kegiatan cabang Makassar, perpecahan Perserikatan Selebes, pembentukan Partai Selebes serta penggabungan perserikatan selebes dan Partai Selebes menjadi Partai Sarekat Selebes, dan akhir perjalanan Partai Sarekat Selebes dengan bergabungnya ke dalam Parindra.

Bab V, berisi tentang hasil dari penjabaran dari bab I hingga IV dengan menarik kesimpulan disetiap gambaran terkait dari Perserikatan Selebes ke Partai Sarekat Selebes 1930-1935. Dengan hasil kesimpulan tersebut merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah bagi penulis serta menjadi penutup dari hasil penelitian dan penulisan dari karya tulis tersebut. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran terkait penulisan dan penelitian dari karya tulis tersebut.



BAB II

MENUJU NASIONALISME 1920-AN

Bab ini membahas terkait gambaran umum mengenai kesadaran nasionalisme serta bentuk pergerakan nasional di tengah pemerintahan Hindia-Belanda. Pembahasan dimulai dari lahirnya kesadaran kaum pribumi akibat kebijakan yang diberlakukan pemerintah Hindia-Belanda sehingga membuka ruang bagi kaum pribumi membentuk organisasi-organisasi seperti Boedi Utomo, Sarekat Islam, *Indische Partij* dan perkumpulan-perkumpulan lainnya. Selanjutnya menjelaskan terkait konsep nasion dan nasionalisme dengan menjelaskan terkait sumpah pemuda sebagai lahirnya persatuan banga Indonesia.

2.1 Menuju Nasionalisme

Penerapan Politik Etis pada awal abad ke-20 oleh pemerintahan Hindia-Belanda menjadi titik awal tumbuhnya kesadaran di kalangan kaum pribumi mengenai dorongan untuk lepas dari kolonisasi pemerintahan Hindia-Belanda. Politik Etis merupakan bentuk politik balas budi yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia-Belanda sebagai tanggapan atas penderitaan penduduk pribumi sebelumnya yang diakibatkan pelaksanaan kebijakan tanam paksa. Tujuan pelaksanaan Politik Etis sebagai bentuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi di wilayah Pemerintahan Hindia-Belanda seperti melalui program pendidikan, irigasi, dan transmigrasi. Penerapan kebijakan Politik Etis dapat dilihat



pengakuan atas jasa para petani Jawa yang telah banyak memberikan
di dalam menopang kekuatan ekonomi pemerintahan Hindia-Belanda.

Namun, pelaksanaan Politik Etis yang tidak disertai dengan kontrol yang memadai justru memunculkan dampak yang tidak diantisipasi oleh pemerintah Hindia-Belanda menjadikan munculnya kesadaran kolektif di kalangan kaum pribumi terhadap ketimpangan yang mereka alami. Hal ini menjadi pemicu awal kebangkitan nasional melalui lahirnya gerakan Nasionalisme sehingga Politik Etis yang semua dimaksudkan untuk memperkuat pemerintahan Hindia-belanda secara tidak langsung menjadi faktor tumbuhnya kesadaran nasional dan semangat perlawanan terhadap kolonialisme bagi penduduk kolonialisme.²⁰

Kebijakan Politik Etis pertama kali diterapkan sekaligus dilaksanakan pada saat berlangsungnya pidato Ratu Wilhelmina di tahun 1901. Pada pidato tersebut Ratu Wilhelmina mengumumkan terkait suatu penyelidikan tentang kesejahteraan di Jawa. Selain itu, diterapkannya politik etis menjadikan Alexander W.F. Idenburg terpilih sebagai Menteri urusan Daerah Jajahan di tahun 1902. Kemudian, pada tahun 1909 beliau menjadi gubernur Jendral.²¹ Dengan memegang jabatan sebagai gubernur menjadikan Idenburg mempraktikan pemikiran-pemikiran politik etis di kalangan rakyat pribumi.²²

²⁰ Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern*. 319.

²¹ Oktavianuri Deffi. *Politik Etis dan Pergerakan Nasional*. (Pontianak: Derwati. 2019). 05.

²² Dalam politik etis terdapat tiga prinsip yang dianggap menjadi dasar kebijakan yang dilaksanakan. Adapun ketiga prinsip tersebut adaah Pendidikan, pengairan dan perpindahan penduduk. Untuk melaksanakan ketiga prinsip tersebut nerintahan Hindia-Belanda melaksanakan proyek-proyek tersebut dalam leh dana dilakukan peminjaman. Oleh karena itu hutang pemerintahan elanda memiliki hutang mencapai 40 Juta gulden sehingga megakibatkan ahan diambil alih oleh Belanda. (Oktavianuri. *Politik Etis dan Pergerakan* . 05.



Salah satu bentuk kebijakan politik etis yang mempengaruhi para penduduk pribumi adalah pendidikan. Pendidikan menjadi alat utama untuk mengangkat dan menuntun para penduduk pribumi agar memperoleh pendidikan melalui konsep modernitas yang bercirikan Belanda. Dalam meningkatkan pendidikan di kalangan kaum pribumi maka pemerintah Hindia-Belanda mendirikan *Hollandsche Inladansche School* (HIS), *Meer Uitgebreide Lagere Onderwijs* (MULO), *Hollandsche Burgerschollrn* (HBS), *Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA) dan *School tot Opleiding Van Inlandsche Artsen* (STOVIA). Adanya sekolah-sekolah tersebut memberikan pengaruh dan perubahan besar di kalangan kaum pribumi. Hal ini dapat dilihat melalui parah tokoh-tokoh pemuda dan anak kaum *priyayi* yang memperoleh pendidikan di sekolah buatan belanda.²³

Indonesia mulai memperoleh kesempatan yang lebih luas dalam bidang pendidikan, yang ditandai dengan berdirinya sejumlah lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah Hindia-Belanda sebagai sarana penunjang untuk memperluas akses terhadap pendidikan. Sebelum belanda membentuk sekolah-sekolah bagi para kaum pribumi, terdapat perbedaan yang sangat jelas di dalamnya seperti pada sistem pendidikan pribumi yang tidak memberikan kesempatan bagi seorang kaum pribumi untuk melompat dari sistem Eropa yang paralel. Sistem eropa paralel merupakan satu-satunya lembaga untuk menuju ke tahap pendidikan



Nasihin. *Sarekat Islam Mencari Ideologi*. 28-29.

lanjutan. Oleh karena itu maka dibentuk lembaga-lembaga pendidikan yang dapat ditempuh bagi kaum pribumi.²⁴

Penerapan Politik Etis melalui perkembangan pendidikan di kalangan kaum pribumi menjadikan munculnya kesadaran baru yang sebelumnya mengalami penindasan melalui penerapan kebijakan yang tidak hak asasi oleh pemerintahan Hindia-Belanda. Dalam hal ini mendorong para kaum pribumi mengenal akan pentingnya politik melalui pembentukan organisasi-organisasi sebagai alat yang mendorong melawan pemerintah Hindia-Belanda. Pembentukan organisasi-organisasi ini menjadikan sebagian besar wilayah Hindia-Belanda mengalami perubahan. Hal ini dapat dilihat melalui gerakan-gerakan anti penjajahan dan pembaharuan yang dilakukan penduduk pribumi terhadap kolonisasi pemerintah Hindia-Belanda.²⁵

Salah satu bentuk gerakan dalam memerangi atau melawan pemerintahan Hindia-Belanda adalah dengan membentuk organisasi yang menjadi dasar munculnya ide-ide baru dalam menemukan identitas suatu bangsa itu sendiri. Dalam hal ini organisasi-organisasi yang muncul di masa tersebut mulai mengaitkannya dengan ranah politik.²⁶ Adapun organisasi pertama kali muncul di tengah pemerintahan Hindia-Belanda adalah Budi Oetomo yang menjadi organisasi pemuda pertama pada Mei 1908 yang pembentukannya dilatarbelakangi atas dasar

²⁴ Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern*. 333.

Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern*. 341.

Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern*. 342.



perkumpulan para tokoh pemuda kaum *priyayi* yang sedang menempuh pendidikan di salah satu sekolah bentukan belanda yaitu STOVIA²⁷ dengan arah tujuan organisasi ini sebagai bentuk kelompok diskusi bagi para tokoh pemuda yang berada di lingkungan STOVIA terkhusus orang Jawa dan Madura. Adapun tokoh penggerak pembentukan Budi Oetomo adalah Soetomo dan Wahidin Sudirohusodo.

Namun, pada Oktober 1908 Budi Oetomo menggelar kongres pertamanya di Yogyakarta. Pada pelaksanaan kongres tersebut muncul anggota baru yang bergabung ke dalam organisasi Budi Oetomo, yaitu Tjipto Mangunkusumo merupakan seorang dokter yang memimpin sekelompok minoritas. Dalam kongres tersebut Tjipto mengeluarkan pendapatnya bahwa beliau menginginkan agar Budi Oetomo menjadi partai politik dengan arah tujuan mencakup secara keseluruhan dalam hal kepentingan bersama memperjuangkan rakyat pribumi yang bukan hanya berfokus pada golongan *priyayi* melainkan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.²⁸

Di tengah terbentuknya Budi Oetomo sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang politik, terbentuklah pula beberapa organisasi-organisasi lainnya yang bergerak dalam ranah yang sama yaitu politik bersifat kepartaian. Adapun organisasi tersebut adalah Sarekat Dagang Islam yang terbentuk di tahun 1909 dengan pembentukannya di bawah naungan Tirtoadisurjo yang merupakan lulusan

²⁷ STOVIA (*School tot Opleiding Van Inlandsche Artsen*) merupakan salah satu sekolah pribumi yang awal terbentuknya merupakan sekolah “Dokter-Jawa” 1900-1902 di Weltevreden lalu kemudian berganti nama menjadi STOVIA di tahun 1902 dengan tujuan sebagai sekolah untuk pelatihan dokter-dokter pribumi. ini dipimpin oleh Dr. H.F Rool atau dikenal sebagai bapak STOVIA. . *Sejarah Indonesia Modern*. 330)

Shiraishi. *Zaman Bergerak*. 44-46.



OSVIA.²⁹ Awal pembentukan organisasi ini sebagai organisasi yang membantu pedagang-pedagang Indonesia. kemudian di tahun 1911 beralih menjadi Sarekat Islam (SI) di bawah kepemimpinan Tjokroaminoto. Pada awalnya, Sarekat Islam merupakan organisasi yang berorientasi pada kegiatan sosial yang mencakup ranah perdagangan, persaudaraan sesama Islam, kemajuan antar bangsa dan agama. Namun, pada periode berikutnya di tahun 1916-1921 Sarekat Islam mengalami pergeseran arah dengan mulai terlibat dalam kepentingan politik melalui penyelenggaraan kongres-kongres yang diikuti seluruh utusan cabang di setiap wilayah Hindia-Belanda, termasuk cabang Sulawesi.³⁰

Pada tahun 1911 terbentuk suatu partai politik pertama dengan satunya-satunya partai politik yang menyuarakan “Hindia untuk Hindia” (Kemerdekaan Hindia di tangan Belanda). Adapun partai tersebut adalah *Indische Partij* dengan pembentukannya di bawah pengaruh oleh 3 serangkaian tokoh yaitu Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo dan Soewardi Suryaningrat. Ketiga tokoh ini dalam pembentukan *Indische Partij* menyuarakan kebebasan untuk masyarakat Hindia. Dalam propaganda, Douwes dekker menyampaikan terkait tujuan *Indische Partij*

²⁹ OSVIA (*Opleiding scholen voor Inlandsche Ambtenaren*) merupakan sekolah pelatihan yang diperuntukan para pejabat pribumi. Sekolah ini dibentuk pada tahun 1900 oleh Abendanon dengan awal pemebentukannya sebagai *Hoofdenscholem* “Sekolah Para Kepala”. Sekolah ini didirikan sebagai sekolah yang direncanakan untuk menghasilkan pegawai pemerintahan. (Ricklefs. *Sejarah Modern*. 330)

Noer Delier. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. (Jakarta: 982). 125-126.



dibentuk untuk mempersiapkan Negara Independen yang lepas dari Subordinasi³¹ Belanda dengan memberikan pandangan terkait anti kolonialisme di tanah Hindia. Selain itu, partai ini menjadi salah satu partai yang menggunakan konsep nasionalisme terhadap Hindia dengan menuntut kemerdekaan.³²

Indische Partij bukan hanya satu-satunya organisasi yang berperan penting dalam pergerakan nasional. Terdapat pula organisasi lain yang memiliki arah pergerakan sama, yaitu berbasis ideologi komunis seperti; *Indische Social Democratische Vereeniging* (ISDV). Organisasi ini didirikan pada tahun 1913 di bawah naungan H.J.F.M Sneevliet yang merupakan tokoh berbangsa Belanda. Pada aktivitas propagandanya, Sneevliet melakukan aktivisme dengan aktif menyuarakan akan hak-hak di kalangan buruh yang disertai penyebaran akan paham sosialis dan paham marxisme terhadap penduduk Hindia. Selain itu, untuk memperluas pengaruhnya, organisasi ini menjalin kerja sama dengan partai-partai

³¹ Subordinasi merupakan suatu konsep yang menggambarkan kondisi ketergantungan suatu pihak terhadap pihak lain yang memiliki otoritas atau kekuasaan yang lebih tinggi. Dalam ranah kolonialisme, subordinasi tercermin dalam relasi yang asimetris antara kekuatan kolonial dan masyarakat jajahan, di mana kelompok pribumi secara sistematis ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah dalam struktur politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Sistem kolonial membentuk tatanan hierarkis yang mengonsentrasikan kekuasaan di tangan penjajah, sementara masyarakat lokal dipandang kurang cakap, tidak modern, dan tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan pemerintahan sendiri. Dominasi ini diperkuat melalui berbagai instrumen kebijakan administratif, sistem pendidikan kolonial, serta peraturan hukum yang membatasi peran serta masyarakat pribumi dalam proses politik. (Rizky Ahmad M.U. "Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 14, no. 2. (2010). 177.)



Wildan Sena Utomo. "Nasionalisme dan gagasan Kebangsaan Indonesia pemikiran Soewardi Suryaningrat, Tjiptomangoenkusomo dan Douwes 912-1914." *Lembaran Sejarah*. Vol.11. No. 1. (2014). 64.

lainnya, seperti yang terjadi pada periode awal 1915-1916 Sneevliet bekerja sama dengan Insulinde, partai politik pertama yang berdiri di Hindia-Belanda pada tahun 1907. Pada tahun 1920 ISDV mengalami perubahan nama dengan beralih menjadi Partai Komunis Hindia (PKH).³³

Pembentukan beberapa organisasi dan partai yang bergerak dalam ranah politik melalui perkembangan ide-ide dengan melahirkan suatu pergerakan melalui pembentukan organisasi tersebut. Lahirnya organisasi seperti Boedi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, dan ISDV menandai munculnya kepemimpinan baru di kalangan penduduk pribumi. Kehadiran organisasi-organisasi ini turut mendorong kesadaran untuk menemukan jati diri bangsa serta menjadi sarana sebagai bentuk melakukan perlawanan terhadap kolonisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia-Belanda.

Namun, pembentukan organisasi-organisasi yang melahirkan akan pergerakan menyebabkan pemerintah Hindia-Belanda menerapkan kebijakan Represif pada tahun 1926. Kebijakan ini diterapkan sebagai bentuk membatasi aktivitas ruang gerak kaum pribumi melalui organisasi-organisasi yang terbentuk pada saat itu. Pemerintah Hindia-Belanda menganggap bahwa lahirnya organisasi-organisasi tersebut sebagai ancaman karena organisasi ini menyadarkan para penduduk kaum pribumi akan situasi kolonisasi yang mereka hadapi. Atas dasar itu, pemerintah Hindia-Belanda memberlakukan beberapa kebijakan diantaranya:



Shiraishi. *Zaman Bergerak*. 132-133.

- a. Penghapusan kebebasan berkumpul (pengadaan rapat/kongres)
- b. Penghapusan kesejahteraan bagi para pekerja khususnya kaum pribumi
- c. Pembentukan satuan khusus yang dijalankan oleh polisi sebagai kepanjangan tangan pemerintah Hindia-Belanda³⁴

Kesadaran penduduk pribumi dalam pentingnya identitas bangsa menjadi titik awal dalam pemahaman mengenai paham nasionalisme. Paham nasionalisme menjadi salah satu bentuk reaksi oleh kelompok terhadap kelompok berkuasa. Dalam hal ini, nasionalisme menjadi dasar akan kebijakan yang dapat menjadi konservatif. Konsep nasionalisme diperkenalkan oleh Soekarno melalui rangkaian segala aktivitas untuk menyadarkan kepada kaum pribumi akan pentingnya suatu nasionalisme dalam diri bangsa. Paham nasionalisme mulai dikenal oleh penduduk pribumi melalui lahirnya Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927 dengan pembentukannya di bawah naungan Soekarno sebagai pelopor utama gagasan dan konsep nasionalisme. Partai ini menjadi wadah perjuangan penduduk kaum pribumi berlandaskan nasionalisme.³⁵

2.2 Konsep Nasion dan Nasionalisme

Munculnya kesadaran Nasionalisme ditandai dengan penggunaan bahasa sebagai salah satu unsur dalam membentuk identitas kebangsaan. Bahasa menjadi alat pemersatu yang mempresentasikan kebangkitan nasionalisme terutama dalam konteks keterkaitan antar wilayah dan identitas budaya. Dapat dilihat bahwa



Nasihin. *Sarekat Islam Mencari Ideologi*. 114-115.

Takashi. *Zaman Bergerak*. 296-297.

Ideologi nasional memiliki pengaruh besar dalam konsep munculnya kesadaran nasionalisme. Ideologi nasional dibangun dengan menekankan unsur-unsur fatalitas primordial³⁶ melalui penggunaan bahasa-bahasa tertentu di setiap wilayah. Selain itu, nasionalisme turut melahirkan berbagai kebijakan yang berdasar pada pentingnya pendidikan sebagai sarana utama dalam mengelola dan mengarahkan suatu negara. Hal ini dapat dilihat melalui pelaksanaan propaganda oleh organisasi-organisasi yang digunakan sebagai alat untuk mempermudah mencapai nasionalisme.³⁷

Sebelum Indonesia lahir sebagai suatu negara yang utuh, pada masa kolonial nama Indonesia dipakai oleh kaum pergerakan dengan tujuan sebagai nama politik atau makna politik. Penggunaan ini dilakukan sebagai bentuk mengekspresikan dalam tujuan politik.³⁸ Perbedaan antara nasion dan nasionalisme dapat dilihat dalam penjelasannya bahwa nasion merupakan kolektivitas politik nyata dengan wilayah menuju suatu kolektivitas politik sementara nasionalisme itu sendiri berkaitan dengan suatu alat kebangsaan. Hal ini dapat dilihat bahwa, konsep keduanya menunjukkan adanya sifat kolektivitas politik yang didasarkan pada

³⁶ Fatalitas primordial merujuk pada anggapan bahwa ikatan-ikatan dasar seperti etnis, agama, ras, dan kekerabatan bersifat mutlak, tidak dapat diubah, dan secara otomatis menentukan orientasi politik maupun sosial seseorang. Pandangan ini mengasumsikan bahwa konflik atau solidaritas antarkelompok terjadi secara alami karena perbedaan identitas yang dianggap esensial. (Anderson Benedict. *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*. (Yogyakarta: INSIST Pres. 2002). 65)



Benendict. *Imagined Communitie*. 65.

Benendict. *Imagined Communitie*. 148.

kesamaan sejarah, budaya dan aspirasi bersama. Selain itu menunjukkan bahwa ideologi atau kesadaran kolektif digunakan untuk memperjuangkan dalam pembentukan suatu bangsa itu sendiri.³⁹

Tahapan pertama kebangkitan nasional ditandai dengan berakhirnya pemberontakan PKI pada 1926 melalui kegagalan propaganda yang dilaksanakan oleh PKI. Adanya pemberontakan ini, sebagian besar wilayah Indonesia khususnya daerah-daerah mulai bermunculan melalui pembentukan organisasi-organisasi yang didasarkan pada suku. Hal ini menjadi salah satu bentuk pergerakan di berbagai elite-elite birokrasi dan penduduk demi mencapai kepentingan yang diinginkan.⁴⁰

Organisasi-organisasi kedaerahan mulai bermunculan pada tahun 1909 yang mencakup seluruh wilayah Hindia-Belanda. Kemunculan organisasi-organisasi kedaerahan ini berawal dari kalangan pelajar yang di mana sebagian besar didasarkan atas identitas-identitas kesukuan. Adapun organisasi-organisasi kedaerahan yang mulai bermunculan pada saat itu adalah Tri Koro Dharmo (1909) yang kemudian di tahun 1918 mengalami perubahan dengan menjadi *Jong Java* “Pemuda Jawa”, *Jong Sumatranen Bond* “Perserikatan Pemuda Sumatera” (1917), *Jong Ambon* “Pemuda Ambon” (1918), *Studerenden Vereeniging* Minahasa (1918), *Jong Celebes* (1919).⁴¹ Munculnya organisasi-organisasi ini mengantarkan dalam

³⁹ Benendict. *Imagined Communitie*. 6-7.

Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern*. 386.

Sartono. *Sejarah Pergerakan Nasional*. 122.



pelaksanaan Kongres Sumpah Pemuda I pada 30 April 1926 yang diselenggarakan di Jakarta.⁴²

Dalam kongres Sumpah Pemuda I adapun panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan kongres tersebut adalah sebagai berikut Ketua; Mohammad Tabrani (Jong Java), wakil ketua; Soemarto (Jong Java), sekretaris; Djamaluddin (Jong Sumatranen Bond), Sekretaris; Djamaluddin (Jong Sumatranen Bond), Bendahara; Socwarsi (Jong Java) dan untuk anggotanya sendiri terdiri dari Bahder djohan (Jong Sumatranen Bond), Jan Toule Soulehwij (Jong Ambon), Paul Pinonroan (Jong Celebes), Achmad Hamami (Sekar Rockocn), Sanoesi Pane (Jong Bataks Bond), dan Sarbaini (Jong Sumatra Bond).⁴³

Partai Nasional Indonesia merupakan partai yang memperkenalkan unsur nasionalisme sebagai landasan utama perjuangannya. Pembentukan partai ini diprakarsai oleh Soekarno, yang sekaligus menjabat sebagai ketua partai. Partai Nasional Indonesia (PNI) pembentukannya bertujuan untuk memperoleh kemerdekaan bagi kepulauan Indonesia dengan melalui cara non kooperatif serta melalui organisasi massa. Dalam keanggotaanya, partai politik ini memiliki anggota secara keseluruhan berasal dari etnis Indonesia, hal ini berdasarkan dengan tujuan yang akan dicapai dalam partai ini semata-mata menciptakan kemerdekaan politik



Mardanas Safwan. *Peran Gedung Kramat Rakyat 106 dalam Melahirkan Pemuda*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Pariwisata. 2009). 15.

Safwan. *Peran Gedung Kramat Rakyat*. 15-16.

dengan berpandangan kewilayahan yang mencakup secara keseluruhan wilayah Indonesia.⁴⁴ Asas partai ini berideologi nasionalisme sekuler.⁴⁵

Dalam menegakkan nasionalisme Indonesia, PNI yang didirikan oleh Soekarno menjadi partai sebagai alat penggerak. Menurut Soekarno, nasionalisme sebagai suatu kekuatan bagi bangsa-bangsa yang terjajah yang kelak akan membuka masa gemilang bagi suatu bangsa. Melalui nasionalisme bangsa Indonesia akan mendirikan syarat-syarat hidup merdeka yang bersifat kebatinan dan kebendaan. Nasionalisme inilah yang akan menjadi salah satu bentuk penekanan terhadap kolonialisme yang di mana akan mengalami perubahan menjadi nasionalisme yang dinamis.⁴⁶

Pada akhir tahun 1927, Soekarno merealisasikan pembentukan sebuah front persatuan bernama PPPKI (Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan). Front ini merupakan sebagai wadah bagi setiap organisasi-organisasi dan partai politik yang berjuang dalam memperoleh kemerdekaan Indonesia. PPPKI melaksanakan kongres pertamanya di Surabaya dengan dihadiri oleh para utusan dari partai-partai politik Indonesia yang berasaskan kebangsaan. kongres tersebut berlangsung pada

⁴⁴ Sartono. *Sejarah Pergerakan Nasional*. 185-186.

⁴⁵ Nasionalisme sekuler merupakan bentuk nasionalisme yang menekankan kesetiaan terhadap negara dan identitas kebangsaan tanpa menjadikan agama sebagai dasar utama. Tujuan utama nasionalisme ini adalah menciptakan persatuan nasional berdasarkan kesamaan sejarah, bahasa, dan budaya, serta menjamin kesetaraan semua warga negara terlepas dari latar belakang keagamaan mereka.

lin Samsuddin. *Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek* (Perpustakaan Nasional. 1988). 38

Samsuddin. *Soekarno Pemikiran Politik*. 38.



30 Agustus - 02 September di Surabaya.⁴⁷ Adapun organisasi-organisasi dan partai politik yang bergabung dalam front bersatu ini adalah Partai Nasional Indonesia, Partai Sarekat Islam, Pasundan, Budi Oetomo, Studieclub, Sarekat Sumatera, Sarekat Madura, Kaum Betawi, Persatoean Bangsa Indonesia, Perserikatan Selebes, Partai Selebes, Sarekat Ambon, Timorsch Verbond, dan Partai Indonesia.⁴⁸

Pada pelaksanaan Kongres Sumpah Pemuda I agenda pembahasan terkait perumusan bahasa dan kesusastraan Indonesia. Beberapa peserta kongres menyuarkan pentingnya penggunaan bahasa melayu sebagai bahasa pemersatu yang akan menjadi bahasa bangsa Indonesia. Selain itu, dilakukan pembicaraan terkait kewajiban agama dalam pergerakan kebangsaan yang di mana berkaitan dengan sikap toleransi terhadap agama lainnya. Dari pelaksanaan kongres tersebut belum menghasilkan kesepakatan yang konkret dikarenakan terdapat perbedaan pandangan diantara organisasi-organisasi yang turut hadir dalam pelaksanaan kongres.⁴⁹

Setelah pelaksanaan Kongres I yang belum menghasilkan keputusan, maka dilaksanakan kongres sumpah pemuda II pada 27 Oktober 1928 yang diadakan di Gedung *Katholieke Jongenlingen Bond*. Adapun susunan panitia pelaksana kongres Sumpah Pemuda II Ketua; Sugondo djojopuspito (PPPI), wakil ketua; R.M. Joko Marsaid (Jong Java), sekretaris; Muhammad Yamin (Jong Sumatranen Bond),

⁴⁷ Dellamenais. "Menyambut Kongres PPPKI". 89

Gebeim Voor den Dienst. *Inheemsche Vereenigingen*. (Batavia: kerj. 1934). 01.

Safwan. *Peran Gedung Kramat Rakyat*. 15-16.



Bendahara; Amir Sjarifuddin (Jong Bataks Bond), pembantu I; Johan Mohammad Cai (Jong Islamieten Bond), Pembantu II; R. Katjasoengkana (Pemuda Indonesia), Pembantu III; R.C.I. Sandoek (Jong Celebes), Pembantu IV; Johannes Leimene (Jong Ambon), Pembantu V; Mohammad Rochjani Su'ud (Pemuda Kaum Betawi). Pelaksanaan kongres II dihadiri oleh beberapa organisasi kedaerahan serta beberapa tokoh-tokoh partai politik. Dalam pelaksanaan Kongres II menjadi perumusan persatuan dan kesatuan antar sesama bangsa. Hasil dari kongres ini menghasilkan keputusan terkait dengan menegaskan Indonesia sebagai tanah air yang satu, bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa, serta bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu seluruh rakyat Indonesia.⁵⁰ Berikut Bunyi Hasil Kongres II Sumpah Pemuda:

Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia
Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satu bangsa Indonesia
Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Pergerakan menuju konsepsi nasional dibagi ke dalam beberapa periode pembentukan organisasi, seperti:

- a. Periode 1911-1916 yang memberi corak dan bentuk bagi partai atau organisasi yang terbentuk di tahun tersebut.
- b. Periode 1916-1924 yang dapat dikatakan merupakan periode puncak keaktifan

Partai atau organisasi dalam melawan pemerintahan Hindia-Belanda



Foulcher Keith. *Sumpah Pemuda makna dan proses penciptaan simbol an Indonesia*. (Jakarta: Komunitas Bambu. 2008). 10-13.

- c. Periode 1921-1927 menjadi periode konsolidasi, pada periode mengalami tekanan dari pemerintah Belanda
- d. Periode 1927-1942 dalam periode ini memperlihatkan usahanya untuk tetap hidup dalam forum politik Indonesia melalui konsep nasionalisme.⁵¹

Dari beberapa periode tersebut, periode ketiga dan keempat menjadi periode berlangsungnya masa nasionalisme, dalam hal ini periode tersebut menjadi salah satu bagian dari pembentukan organisasi Perserikatan Selebes sebagai bentuk organisasi yang bergerak dalam ranah nasionalis. Di samping itu dalam periode ini terdapat salah satu front yang menjadi tempat berkumpulnya seluruh organisasi yang ada di Indonesia dengan bergerak pada bidang nasionalisme melalui arah tujuan yang sama yaitu melawan pemerintahan Hindia-Belanda demi kepentingan memperoleh kemerdekaan bagi rakyat Indonesia.⁵²

Dalam konsep nasionalisme, terdapat kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar munculnya nasionalisme itu sendiri. Dalam hal ini kebijakan tersebut yaitu tingkat pendidikan dasar wajib. Dalam hal ini pendidikan tersebut dikendalikan oleh negara. Selain itu terdapat propaganda yang diorganisir oleh negara, penulisan kembali sejarah secara resmi, militerisme, dwitunggal, serta dinasti bangsannya. Kebijakan-kebijakan ini menjadi dasar terwujudnya nasionalisme dalam suatu bangsa. selain itu dalam lahirnya konsep nasionalisme didasari atas tingkat melek huruf, penyebaran bahasa, dan pertumbuhan kaum liberal.⁵³



Husain. *Sejarah Sekolah Makassar*. 91.

Husain. *Sejarah Sekolah Makassar*. 91.

Benendict. *Imagined Communitie*. 55-70.



Optimized using
trial version
www.balesio.com